

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya terdapat sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih kepada mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi suatu daya tarik wisata.

Pengembangan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan

yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanjanya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung hingga kini masih menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan. Namun, banyak kalangan menilai Bandung tidak saja dijadikan kota wisata, tetapi juga kota perdagangan dan kota pendidikan. Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa (Hotel dan Restoran), pemerataan pembangunan dengan dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan untuk menuju obyek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah.

Dalam meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak sektor pariwisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. Menurut ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Bapak Herman Muchtar, Pajak Hotel merupakan pos pajak yang memiliki andil besar dalam penerimaan Pajak Daerah dari sektor pariwisata, pada tahun 2009 sektor pariwisata menyumbang PAD hingga 50% yang terdiri dari Pajak Hotel Rp 70

Miliar lebih, Pajak Restoran Rp 50 Miliar lebih, Pajak Hiburan Rp 20 Miliar lebih. Besarnya pajak-pajak tersebut dikarenakan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat. Berikut data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Maupun
Nusantara Di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)
2006	4.871.351
2007	5.505.759
2008	6.429.027
2009	7.585.444
2010	6.712.824

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, 2010

Dari data tersebut terdapat peningkatan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan setiap tahunnya ke Kota Bandung sebanyak 7 %. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang gencar mempromosikan potensi wisata. Sebagai tujuan wisata, Kota Bandung memiliki segalanya, udara yang sejuk, wisata belanja yang menyediakan aneka fashion, kafe dan restoran yang unik dengan pilihan berbagai jenis makanan, serta pilihan berbagai obyek wisata yang bervariasi. Oleh karena itu, tidak aneh pada setiap akhir pekan khususnya pada saat liburan panjang, warga dari luar kota Bandung terutama dari Jakarta, beramai-ramai datang ke kota yang memiliki julukan *Paris Van Java* ini.

Sehingga untuk memfasilitasinya, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menambah kenyamanan para wisatawan pada saat berwisata di Kota Bandung. Seperti pada Tabel 1.2 (jumlah potensi pariwisata di Kota Bandung), berdasarkan daftar yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2010:

Tabel 1.2
Jumlah potensi pariwisata di kota bandung tahun 2010

Potensi Pariwisata	Jumlah
Hotel Melati	215
Hotel Bintang	94
<i>Restaurant</i>	472
Karaoke	70
Diskotik	3
Pub	20
<i>Night Club</i>	11
Panti Pijat	24
Bioskop	11

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung, 2010

Jumlah potensi pariwisata di Kota Bandung dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun ini mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini juga berpengaruh terhadap minat para wisatawan untuk berwisata ke Kota Bandung. Dengan kedatangan para wisatawan yang tinggi, cukup banyak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Untuk itu, sektor pariwisata di Kota Bandung sudah seharusnya dapat membantu mempertahankan kunjungan wisatawan ke kota ini. Sehingga PAD Kota Bandung akan tetap stabil dan terus meningkat. Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkat perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama (Salah, 2003:16).

Sektor industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya

membiyai pengeluaran daerah. Terobosan dimaksud salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan potensi-potensi kepariwisataan yang baru di Kota Bandung. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama pajak yang dihasilkan dari potensi pariwisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga judul penelitian ini adalah: **“Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandung. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bandung selama Tahun 2007-2011?
2. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
3. *Feedback* apa yang diberikan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil Pendapatan Asli Daerah untuk perkembangan pariwisata Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bandung selama Tahun 2007-2011.
2. Mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Menganalisis *feedback* yang diberikan Pemerintah berdasarkan hasil Pendapatan Asli Daerah untuk perkembangan pariwisata Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Bandung dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak.
2. Sebagai bahan masukan kepada pelaku usaha pariwisata, dalam hal ini adalah *stake holder* untuk menanamkan modalnya dalam bidang kepariwisataan agar dapat membantu Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor pariwisata.
3. Memperluas wawasan masyarakat dan memberikan kontribusi mengenai pariwisata dalam mencapai kepariwisataan berbasis masyarakat.
4. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “**Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**”. Kesalahan penelitian

judul dapat menimbulkan kesimpulan lain dari penelitian. Maka, penulis merasa perlu memberikan batasan dalam definisi operasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut T. Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh sektor pariwisata dari pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Menurut Rochamat Soemitro (2011:11), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun pengertian lain menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Sedangkan menurut Perda Kota Bandung No.10 Tahun 2004, hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan

perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar.

Di dalam Perda Kota Bandung No.10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Adapun pengertian lain Soekresno (2000,16-17), restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan dan minuman bagi masyarakat umum dan dikelola secara profesional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian lain Abdul Halim (2004:67) mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.